

Manajemen Krisis Model Fink Dalam Menangani Kasus Protes Tuntutan Pelantikan Kepala Desa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Ajeng Operasiana

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v2i4.4742>

*Correspondence: Ajeng Operasiana

Email:

ajengoperasiana1919@gmail.com

Received: 11-06-2025

Accepted: 14-07-2025

Published: 21-08-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Pemilihan Kepala Desa tahun 2024 di Kabupaten Banjarnegara mengalami penundaan pelantikan terhadap 57 kepala desa terpilih yang menimbulkan krisis pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis respon Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam mengelola krisis tersebut dengan menggunakan kerangka Model Manajemen Krisis Steven Fink dan Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, sehingga dapat menggambarkan dinamika penanganan krisis dari tahap awal hingga resolusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak fase awal (prodromal), pemerintah melakukan deteksi potensi konflik, dilanjutkan dengan koordinasi lintas sektor ketika eskalasi protes meningkat. Respon yang ditempuh mencakup pembukaan ruang konsultasi kebijakan, penyampaian informasi melalui surat pemberitahuan, serta mediasi untuk meredakan ketegangan. Strategi komunikasi yang semula defensif (diminish) bergeser menjadi konstruktif (rebuild) guna memulihkan kepercayaan publik. Tahap resolusi ditandai dengan pelantikan resmi setelah adanya koordinasi dengan kementerian terkait, yang mengakhiri krisis sekaligus memulihkan stabilitas administratif. Simpulan penelitian menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mampu mengelola krisis penundaan pelantikan kepala desa melalui tahapan deteksi dini, respon cepat saat demonstrasi, koordinasi lintas sektor, hingga pemulihan melalui klarifikasi dan pelantikan bertahap. Pergeseran strategi komunikasi dari diminish ke rebuild terbukti efektif dalam merestorasi legitimasi pemerintah. Meski demikian, penelitian ini masih terbatas pada perspektif pemerintah dan belum menggali pandangan masyarakat serta kepala desa terlibat. Rekomendasi diarahkan pada penguatan sistem deteksi dini krisis sosial, integrasi teori partisipasi publik, dan evaluasi komunikasi pascakrisis guna memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di masa mendatang.

Kata Kunci: Manajemen Krisis, Model Fink, Kepala Desa, Pemerintah Kabupaten, Strategi Komunikasi

Pendahuluan

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Banjarnegara pada Maret 2024 memunculkan krisis pemerintahan pasca keputusan Penjabat (Pj) Bupati untuk menunda pelantikan 57 kepala desa terpilih. Penundaan ini didasarkan pada perubahan regulasi melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 yang merevisi masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun. Keputusan tersebut memicu gelombang protes dan bentrokan yang menimbulkan kerusakan publik dan korban luka. Aksi ini menyoroti

pentingnya manajemen krisis dalam merespons ketegangan yang dipicu perubahan kebijakan.

Fenomena ini menunjukkan lemahnya deteksi dini dan komunikasi publik dalam mengelola potensi krisis. Ketiadaan perencanaan krisis menyebabkan respon pemerintah kurang antisipatif dan transparan, sehingga memicu penurunan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, manajemen krisis menjadi penting untuk mencegah, merespons, dan memulihkan kondisi pasca-krisis secara sistematis. Salah satu model yang relevan untuk menganalisis dinamika ini adalah Model Manajemen Krisis Steven Fink, yang membagi krisis ke dalam empat tahapan: *prodromal*, *acute*, *chronic*, dan *resolution*. Model ini menekankan pentingnya kesiapsiagaan, respon cepat, dan evaluasi pasca-krisis.

Selain itu, pendekatan komunikasi melalui *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT) dari Coombs digunakan sebagai kerangka untuk memahami strategi komunikasi pemerintah dalam menghadapi persepsi publik terhadap krisis. Dalam konteks Banjarnegara, respons komunikasi yang awalnya tidak efektif berangsur membaik melalui pendekatan *rebuild strategy*.

Studi ini penting sebagai refleksi dan pembelajaran institusi pemerintah daerah dalam membangun sistem manajemen krisis yang adaptif terhadap dinamika sosial-politik. Kajian ini juga menekankan peran strategis hubungan masyarakat (humas) dalam menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka, empatik, dan berbasis data. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman teoritis dalam ilmu komunikasi, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengelolaan krisis di ranah pemerintahan daerah.

Metodologi

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan serta menjelaskan fenomena krisis pemerintahan secara faktual dan mendalam. Pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan makna dari peristiwa sosial yang berkaitan dengan penundaan pelantikan 57 kepala desa terpilih oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada Maret 2024, yang kemudian memicu protes publik dan ketegangan sosial-politik. Model manajemen krisis Steven Fink dan kerangka *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT) dari Coombs menjadi landasan teoritik dalam menganalisis tahapan krisis dan strategi komunikasi yang diterapkan pemerintah.

Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Kriyantono (2020), yang bertujuan menggambarkan data secara sistematis, faktual, dan akurat dengan menekankan penggalian makna fenomena secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengungkap proses serta pola komunikasi dan kebijakan yang diterapkan dalam situasi krisis, dengan interpretasi serta konteks sosial sebagai fokus utama.

Subjek penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, khususnya aktor-aktor yang terlibat dalam pengambilan kebijakan dan manajemen krisis, sedangkan objek penelitian berupa strategi manajemen krisis dalam merespons aksi protes tuntutan pelantikan kepala desa. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana pemerintah daerah mendeteksi, merespons, dan memulihkan situasi pasca-krisis, sekaligus mengelola komunikasi publik selama krisis berlangsung.

Data penelitian bersumber dari data primer berupa wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara purposif, serta observasi nonpartisipatif melalui dokumentasi visual, catatan rapat, dan tanggapan media sosial; serta data sekunder yang berasal dari dokumen resmi pemerintah, laporan media massa, artikel ilmiah, situs web resmi, dan unggahan media sosial institusional. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *criteria basic sample* berdasarkan kriteria tertentu, yakni memahami konteks manajemen krisis, merupakan pejabat aktif, terlibat langsung dalam penanganan protes, mengetahui latar kebijakan pelantikan, serta berperan dalam strategi komunikasi dan kebijakan krisis.

Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, observasi nonpartisipatif, dan wawancara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman serta perspektif informan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), meliputi reduksi data, penyajian data dalam narasi tematik yang merefleksikan tahapan krisis menurut Fink serta strategi komunikasi SCCT, serta penarikan kesimpulan yang diverifikasi melalui triangulasi.

Uji kualitas data dilakukan dengan empat kriteria validitas kualitatif menurut Sugiyono (2019), yaitu *credibility* melalui triangulasi sumber dan konfirmasi informan, *transferability* dengan uraian kontekstual agar dapat direplikasi, *dependability* melalui dokumentasi proses analisis, serta *confirmability* dengan menjaga objektivitas peneliti. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian teoretis manajemen krisis dan komunikasi publik, tetapi juga memberi nilai praktis bagi pemerintah daerah dalam membangun sistem manajemen krisis yang adaptif, responsif, serta berlandaskan kepercayaan publik.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menangani krisis yang timbul akibat protes masyarakat terhadap penundaan pelantikan kepala desa terpilih tahun 2024. Penanganan tersebut dianalisis melalui empat tahapan model manajemen krisis yang dikembangkan oleh Steven Fink, yaitu tahap prodromal, tahap akut, tahap kronis, dan tahap resolusi, serta diperkuat dengan pendekatan Teori Komunikasi Krisis Situasional (SCCT) oleh W. Timothy Coombs.

Tahap Prodromal (Tanda Awal Krisis)

Pada tahap ini, gejala awal krisis sudah tampak sejak adanya dinamika pemilihan kepala desa akibat isu rencana penundaan waktu pemilihan dikarenakan penyesuaian dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Seiring itu, muncul pula ketidakjelasan dari pemerintah mengenai waktu pasti pelantikan. Informasi yang tidak terdistribusi dengan baik membuat keresahan masyarakat kian meningkat.

Berdasarkan keterangan dari Pemerintah Daerah, melalui Sekretariat Daerah (Setda) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades). Pemerintah sejak September 2023 telah melakukan berbagai koordinasi dan komunikasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri, termasuk berdiskusi dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) yang berisi pimpinan pimpinan dari lintas instansi. Pemerintah

juga telah bersurat kepada Desa melalui Camat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap ada informasi baru. Namun, masih terdapat kekurangan pada pendeteksian dan antisipasi potensi konflik yang lebih besar. Terutama dalam mencegah miskomunikasi terhadap Kepala Desa Terpilih maupun Kepala Desa Petahana.

Dalam konteks ini, pemerintah seharusnya mulai merancang skenario komunikasi krisis dan menjalin komunikasi terbuka dengan publik serta pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Namun, ketidakterbukaan informasi dan sosialisasi secara langsung serta belum memberikan jaminan kepada Kepala Desa terpilih maupun Kepala Desa Petahana, justru menimbulkan spekulasi negatif, terutama di media sosial dan komunitas masyarakat desa.

Tahap Akut (Krisis Memuncak)

Puncak krisis terjadi pada saat massa pendukung kepala desa menggelar demonstrasi besar-besaran di depan kantor Bupati Banjarnegara pada 30 April 2024. Demonstrasi berujung ricuh hingga menyebabkan 12 korban luka-luka, 10 diantaranya merupakan massa, 2 lainnya adalah aparat. Selain itu demonstrasi juga menimbulkan kerusakan fasilitas publik. Demonstrasi ini salah satunya muncul karena belum memberikan jawaban yang memuaskan kepada masyarakat yang sebelumnya telah melakukan demonstrasi awal di Pendapa Kabupaten Banjarnegara pada 21 Februari 2024.

Pemerintah merespon dengan melakukan konferensi pers dan menyatakan bahwa pelantikan belum bisa dilakukan karena masih menunggu proses dan penyesuaian dengan UU Desa terbaru, yakni UU No. 3 Tahun 2024. Meskipun sudah mulai ada komunikasi resmi, namun strategi ini belum mampu meredam amarah publik. Pemerintah menggunakan pendekatan komunikasi yang cenderung top-down dan defensif, dengan narasi justifikasi bahwa pelantikan ditunda demi kepastian hukum. Dalam perspektif SCCT, strategi ini termasuk kategori "diminish", yaitu mencoba mengurangi persepsi negatif terhadap pemerintah. Sayangnya, strategi ini tidak cukup efektif karena publik sudah mengatribusikan tanggung jawab penuh kepada pemerintah atas keterlambatan pelantikan.

Tahap Kronis (Masa Pemulihan Awal)

Setelah puncak konflik, kondisi mulai mereda namun belum sepenuhnya pulih. Terdapat kekosongan kepemimpinan di sejumlah desa yang menyebabkan pelayanan publik terganggu. Pemerintah mulai membentuk tim koordinasi antar dinas dan melakukan pendekatan informal kepada beberapa tokoh masyarakat untuk mencegah gelombang protes lanjutan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga mulai menyusun surat koordinasi kepada Kemendagri sebagai dasar hukum pelantikan tahap pertama.

Namun pada tahap ini belum terlihat adanya upaya evaluasi publik atau program rekonsiliasi yang nyata. Informasi masih tersentral di tingkat pejabat tinggi, dan partisipasi publik belum dilibatkan secara aktif. Akhirnya, strategi komunikasi bertransformasi ke tahap "rebuild" yang dalam SCCT digunakan untuk memulihkan kepercayaan. Pemerintah

Kabupaten Banjarnegara memberikan SK Pelantikan sebagai jaminan kepada Kepala Desa Terpilih dan Kepala Desa Petahana tentang kelanjutan dari proses penundaan pelantikan yang diakibatkan oleh perubahan regulasi UU Desa Nomor 3 Tahun 2024.

Tahap Resolusi (Penyelesaian Krisis)

Krisis dinyatakan berakhir setelah pemerintah melaksanakan pelantikan resmi untuk 6 kepala desa terpilih pada 27 Agustus 2024, dan pelantikan tahap kedua sebanyak 51 kepala desa dilakukan pada 3 Februari 2025 setelah keputusan hukum diperoleh. Pelantikan ini dilakukan dengan koordinasi dari Forkopimda dan berbagai perangkat daerah lainnya. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Provinsi yaitu Gubernur. Media lokal dilibatkan dalam peliputan acara untuk menyebarkan pesan bahwa pemerintah sudah menyelesaikan masalah dengan legal dan konstitusional.

Namun demikian, pelantikan yang bersifat administratif ini tidak dibarengi dengan penyembuhan luka sosial secara menyeluruh. Evaluasi pascakrisis hanya dilakukan di tingkat internal. Tidak ditemukan adanya forum warga, diskusi publik, atau laporan evaluasi manajemen krisis yang melibatkan masyarakat.

Analisis Strategi Komunikasi Pemerintah

Strategi komunikasi pemerintah selama krisis bersifat fluktuatif. Pada awalnya, pemerintah cenderung menggunakan strategi penyangkalan (denial) dengan mengatakan bahwa belum ada keputusan yang melanggar hukum. Kemudian, beralih ke strategi justifikasi (diminish), dan akhirnya mengambil pendekatan pemulihan kepercayaan (rebuild) setelah adanya pelantikan.

Namun, dari perspektif SCCT, strategi yang digunakan oleh pemerintah kurang sesuai dengan persepsi publik yang menganggap krisis ini sebagai "preventable crisis", yakni krisis yang seharusnya bisa dicegah jika pemerintah bertindak cepat dan terbuka. Oleh karena itu, seharusnya strategi rebuild lebih ditekankan sejak awal, misalnya dengan permintaan maaf publik dan program pemulihan komunikasi. Maupun memberikan jaminan dari adanya penundaan pelantikan tersebut, agar Kepala Desa dan masyarakat pendukung timbul kepercayaan terhadap keputusan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Keterlibatan Lintas Instansi

Dispermades PPKB, Bagian Pemerintahan, serta Dinas Kominfo Banjarnegara, menjadi aktor penting dalam proses penanganan krisis. Namun, sayangnya tidak ada tim manajemen krisis lintas sektor yang dibentuk secara resmi.

Dinas-dinas tersebut memiliki peran masing-masing sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Dispermades PPKB sebagai peran utama yang mengetahui secara detail kronologi dan proses dinamika penundaan pelantikan kepala desa. Bagian Pemerintahan berperan dalam analisis kebijakan publik dan turut serta dalam agenda komunikasi Forkopimda maupun dengan Pemerintah Pusat untuk berkoordinasi. Lalu Dinkominfo sebagai media penyampaian informasi kepada publik melalui press release yang diunggah

pada website resmi pemerintah, serta mengelola komunikasi dengan media lokal yang bekerja sama. Dinkominfo juga melakukan pengecekan dan menyaring apabila terdapat misinformasi. Setelah ditelusuri, informasi dari berbagai media sudah cukup berimbang dan tidak ada HOAKS.

Refleksi dan Implikasi

Krisis ini menjadi refleksi bahwa pemerintah daerah perlu memiliki sistem deteksi dini terhadap gejolak sosial, terutama dalam momen-momen rawan seperti Pilkadaes. Selain itu, krisis juga menunjukkan bahwa hukum tidak bisa berdiri sendiri tanpa komunikasi publik yang baik. Masyarakat tidak hanya menuntut kejelasan hukum, tetapi juga keadilan, partisipasi, dan kepastian yang menjamin.

Dalam konteks manajemen krisis, pendekatan yang hanya mengandalkan jalur hukum akan menghasilkan pemulihan administratif, bukan pemulihan sosial. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mengembangkan pendekatan manajemen krisis yang bersifat partisipatif, transparan, dan inklusif.

Integrasi Model Fink dan SCCT

Integrasi antara Model Fink dan SCCT dalam konteks krisis Banjarnegara menunjukkan bahwa manajemen krisis yang ideal adalah yang tidak hanya memahami tahapan krisis, tetapi juga mampu menyesuaikan strategi komunikasi dengan ekspektasi dan persepsi publik.

Model Fink memberikan kerangka tahapan yang jelas, sedangkan SCCT memberi petunjuk strategis tentang bagaimana menyampaikan pesan pada setiap tahap tersebut. Dalam kasus ini, pemerintah berhasil menjalani semua tahapan Fink, namun gagal dalam mengoptimalkan strategi komunikasi SCCT secara maksimal, terutama pada tahap prodromal dan akut.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Penelitian ini menegaskan relevansi Model Fink dalam konteks pemerintahan lokal dan menyoroti pentingnya mengintegrasikan pendekatan komunikasi dalam setiap fase krisis. Di sisi praktis, hasil penelitian ini menyarankan bahwa pemerintah daerah perlu menyusun pedoman manajemen krisis secara formal, termasuk pelatihan komunikasi darurat dan pelibatan warga.

Dari hasil dan pembahasan yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menghadapi krisis sosial-politik akibat penundaan pelantikan kepala desa tanpa kesiapan manajemen krisis yang sistematis. Meskipun pada akhirnya krisis terselesaikan secara administratif, namun penyelesaian tersebut belum menyentuh aspek sosial dan komunikasi publik secara memadai. Krisis ini membuktikan bahwa keterlambatan dalam merespon tanda-tanda awal krisis, ditambah komunikasi yang tidak empatik dan tidak partisipatif, akan memperbesar skala konflik serta memperpanjang masa pemulihan sosial.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengelola krisis penundaan pelantikan kepala desa tahun 2024 secara bertahap sesuai dengan tahapan krisis dalam Model Fink, dimulai dari deteksi potensi krisis, respon cepat saat eskalasi puncak, hingga fase pemulihan dan evaluasi pasca-krisis. Krisis ini berakar dari perubahan kebijakan pusat yang berdampak langsung terhadap hasil Pilkades di daerah, sehingga memicu resistensi publik. Pada tahap prodromal, pemerintah mulai menyusun komunikasi awal dan koordinasi, namun keterlambatan penyampaian informasi menimbulkan celah ketidakpercayaan. Krisis mencapai fase akut saat demonstrasi besar terjadi, di mana respon pemerintah mulai diarahkan pada klarifikasi kebijakan dan penanganan segera. Tahap kronis ditandai dengan pemulihan komunikasi publik, dan tahap resolusi diselesaikan melalui pelantikan bertahap serta evaluasi internal pemerintah.

Strategi komunikasi pemerintah menunjukkan pergeseran dari pendekatan defensif menuju pendekatan pemulihan (rebuild), ditandai dengan transparansi dan klarifikasi informasi yang lebih intensif. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi komunikasi adaptif dalam menghadapi krisis yang bersifat preventable, yakni persepsi publik sangat menentukan legitimasi pemerintah.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis dan teoritis, karena hanya melibatkan sudut pandang pemerintah sebagai narasumber utama. Oleh karena itu, kajian lanjutan perlu melibatkan perspektif masyarakat dan memperluas pendekatan teoritis untuk memahami peran partisipasi publik dalam manajemen krisis pemerintahan daerah.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi praktik manajemen krisis di pemerintah daerah, terutama dalam konteks kebijakan yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pergeseran strategi komunikasi pemerintah dari pendekatan diminish menuju rebuild menegaskan pentingnya transparansi, klarifikasi, serta percepatan respons sebagai kunci menjaga kepercayaan publik. Integrasi Model Fink dan SCCT memperkuat pemahaman tentang dinamika krisis, mulai dari deteksi dini hingga resolusi, sekaligus menekankan perlunya kesiapsiagaan komunikasi sejak tahap prodromal. Selain itu, krisis ini menunjukkan bahwa partisipasi publik tidak dapat diabaikan, karena keterlibatan warga berperan besar dalam meredam eskalasi konflik.

Oleh karena itu, rekomendasi praktis yang perlu diperhatikan pemerintah daerah adalah penyusunan crisis communication plan yang adaptif, pembentukan forum komunikasi lintas aktor termasuk masyarakat, serta evaluasi berkala terhadap kebijakan krisis agar kelemahan di masa lalu tidak terulang. Sementara itu, saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggali perspektif kepala desa dan masyarakat, mengintegrasikan teori partisipasi publik dalam analisis, serta melakukan studi komparatif di daerah lain untuk memperkaya pemahaman mengenai pola penanganan krisis pemerintahan lokal.

Referensi

Angkasa, N., & Nuzirwan, N. (2022). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(02), 101–107.

- Anoke, B. (2023). Curbing the Prevalence of Inter-communal Conflicts in Nigeria: The Public Relations Perspective. *BLUESLAND JOURNAL OF ARTS AND SOCIAL SCIENCE*, 1(1).
- Babatunde, K. A. (2022). Public Relations and Social Media for Effective Crisis Communication Management. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 543–553. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.543-553>
- Badan Pemeriksaan Keuangan, R. I. (2025). Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah. Badan Pemeriksaan Keuangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/60295>
- Coombs, W. T. (2023). *The Handbook of Crisis Communication : Second Edition* (H. Sherry (ed.); 2nd ed.). Wiley.
- Coombs, W. T. (2023). *The Handbook of Crisis Communication : Second Edition* (H. Sherry (ed.); 2nd ed.). Wiley.
- Coombs. (2015). *Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding* (4 ed.). Sage Publications.
- detikjateng. (2024, 1 Mei). 3 Fakta Demo Tuntut Pelantikan Kepala Desa di Banjarnegara Ricuh. Diakses pada 15 Juni 2024 dari <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7318906/3-fakta-demo-tuntut-pelantikan-kades-di-banjarnegara-ricuh>
- Dinkominfo. (n.d.). Profil Dinkominfo. Website Dinkominfo Banjarnegara. <https://dinkominfo.banjarnegarakab.go.id/>
- Dispermades. (n.d.). Profil Dispermades. Website Dispermades Kabupaten Banjarnegara. <https://dispermadesppkb.banjarnegarakab.go.id/>
- Dwiana Jati Setiaji. (2024, 28 April). AKSI Banjarnegara Menilai Proses Pilkades 57 Desa Cacat Hukum, Ini Tuntutan Mereka. Diakses pada 15 Juni 2024 dari <https://banyumas.suaramerdeka.com/banyumas/0912530632/aksi-banjarnegara-menilai-proses-pilkades-57-desa-cacat-hukum-ini-tuntutan-mereka>
- Dwianti, Sekar. (2022). Manajemen Krisis Public Relations Pt. Pertamina Ep Lirik Field Wilayah Kerja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Menghadapi Krisis Bencana Non Alam (Pandemi Covid-19). Diakses dari <https://repository.uinsuska.ac.id/60088/1/GABUNGAN%20SKRIPSI%20KECUALI%20BAB%20V.pdf>
- Fajri, Adianugrah. (2022). Strategi Komunikasi Krisis Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19.
- Fearn, B. &. (2017). *Crisis communications: A casebook approach* (5th ed.). Routledge.
- Fitrayatra, E., Sari, N. R. S., & Burhan, P. (2022). Respon Krisis IRT Mengenai Pemberitaan Kelangkaan Minyak Goreng. *Jurnal Politikom Indonesia*, 7(1), 26-39.

- Goeritman, H. I. N. (2021). Crisis communication of Indonesia government during pandemic covid-19 using social media. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi*, 23(1), 1–19. <http://dx.doi.org/10.33169/iptekkom.23.1.2021.1-19>
- Hamdani M. Syam, Azman, D. Y. (2022). Komunikasi Krisis Strategi Menjaga Reputasi Bagi Organisasi Pemerintah. 114.
- Iftikhar, R., Majeed, M., & Drouin, N. (2023). Crisis management process for project-based organizations. *International Journal of Managing Projects in Business*, 16(8), 100–125. <https://doi.org/10.1108/IJMPB-10-2020-0306>
- Ignes Ambarwati, Mochammad Mirza, Ari Suseno, & Alamsyah Alamsyah. (2023). Peran Public Relations dalam Mengatasi Manajemen Krisis. *MASMAN: Master Manajemen*, 2(1), 18–26. <https://doi.org/10.59603/masman.v2i1.256>
- Imanuela, Eunice. (2022). Analisis Manajemen Krisis Humas Kementerian Perdagangan Dalam Menangani Kasus Kelangkaan Minyak Goreng.
- Irwanti, M. (2023). *Manajemen Krisis Komunikasi* (1st ed.). Widina Media Utama.
- Jefkins, Frank. (2019). *Public Relations*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Jekins, F. (2019). *Public Relations* (5th ed.). Penerbit Erlangga.
- Juliana, R., Asmara, S., & Kurniawati, D. (2022). Manajemen Komunikasi Krisis Direktorat Jenderal Pajak dalam Mengatasi Dampak Negatif dari Pemberitaan Pajak Pertambahan Nilai Barang Kebutuhan Pokok. *Komunika*, 18(2), 17-35.
- Kartika, M. (2024). Bupati Konawe Selatan Menangis Akibat Tertundanya Pelantikan 96 Kades Terpilih. *Humas Mahkamah Konstitusi RI*. <https://testing.mkri.id/berita/bupati-konawe-selatan-menangis-akibat-tertundanya-pelantikan-96-kades-terpilih-21748>
- Kelvianto, Listyo. (2020). Manajemen Isu Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menanggapi Berita di Media Massa Tentang Kebakaran Hutan dan Lahan, Universitas Sriwijaya. Diakses dari https://repository.unsri.ac.id/33415/69/RAMA_70201_07031381621149_0001057901_01_front_ref.pdf
- Komunikasi, J., Politik, I., Kasus, T., & Erspro, B. (2025). *Retorika Retorika*. 7482, 303–312.
- Kriyantono, R. (2018). *Public Relations, Issue & Crisis Management* (2nd ed.). Prenadamedia Group.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif* (2nd ed.). Prenadamedia Group.
- Kriyantono, Rachmat. (2017)). *Public Relations Perspektif Barat & Lokal Aplikasi Penelitian dan Praktik*. Jakarta : Prenadamedia Group.

- Lani, O. P., & Handayani, B. (2021). Peranan Humas Pemerintahan (Government Public Relations) dalam Menciptakan Reputasi Pemerintahan yang Baik. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 130-140.
- LSPR. (2023). Membedah Perbedaan Public Relations dan Humas dalam Strategi Komunikasi. *LSPR NEWS ONLINE*. <https://www.lspr.ac.id/perbedaan-public-relations-dan-humas/>
- Luawo, E. R. A. L. (2022). Manajemen Isu Government Public Relation Dalam Menanggapi Berita Pada Media Massa Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Gorontalo (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Monternel, B., Kilag, O. K., & Restauero, G. (2023). Crisis Response and Employee Engagement: The Dynamics of Organizational Resilience with Fink's Model. *Excellencia: International Multi-Disciplinary Journal of Education (2994-9521)*, 1(5), 279–291.
- Monternel, B., Kilag, O. K., & Restauero, G. (2023). Crisis Response and Employee Engagement: The Dynamics of Organizational Resilience with Fink's Model. *Excellencia: International Multi-Disciplinary Journal of Education (2994-9521)*, 1(5), 279–291.
- Muhammad Rafid Alfattah, & Sa'diyah El Adawiyah. (2024). Manajemen Krisis Bank Syariah Indonesia Dalam Membentuk Citra Positif. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 13–23. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i2.910>
- Ningsih, A. S., & Dewi, P. A. R. (2021). Manajemen krisis humas Universitas Negeri Surabaya dalam menangani kasus bullying PKKMB online Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. *Commercium*, 04(02), 172–182 <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/Commercium/article/view/41938>
- Nova, Frisan. (2017). *Crisis Public Relations*. Depok : Rajawali Pers.
- Nurdyansyah, E., Rahim, F., Syazili, M., & Ayu, N. P. (2024). 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Implementasi Manajemen Publik Relation Sebagai Etika Komunikasi Dalam Bisnis 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin. 2(10), 781–788.
- Parlindungan, D. R., & Rengkuan, K. J. (2022). Manajemen Krisis Manajemen Krisis Public Relations PT Jakarta Propertindo dalam Menangani Revitalisasi Taman Ismail Marzuki Jakarta. *KALBISOCIO Jurnal Bisnis dan Komunikasi*, 9(2), 21-26.
- Pemkab, B. (n.d.). Website resmi pemerintah kabupaten banjarnegara. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. <https://banjarnegarakab.go.id/>
- Pramudya, W. (2024). Excellence Theory of Public Relations Dalam Meningkatkan Literasi Data Statistik Provinsi Jawa Tengah Pada Humas Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Universitas Islam Sultan Agung.

- Puskominfo. (2024, 1 Mei) Imbas Diberlakukannya UU No 03/2024, Pelantikan 57 Kepala Desa Terpilih Banjarnegara Ditunda 2 Tahun Kedepan. Diakses pada 15 Juni 2024 dari <https://puskominfo-ppdi.or.id/imbasm-diberlakukannya-uu-no-03-2024-pelantikan-57-kepala-desa-terpilih-banjarnegara-ditunda-2-tahun-kedepan/>
- Ruslan, Rosady. (2017). Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi. Jakarta : Rajawali Pers.
- Scott M, Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom. (2016). Effective Public Relations. Jakarta : Kencana.
- Segarwati, Y., & Rakhmaniar, A. (2022). Strategi Humas Pemerintah Kota Bandung dalam Menangani Krisis Pandemi Covid-19. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 3(2), 119-128.
- Septyana, G. H. (2021). Strategi Manajemen Krisis PORTA BY THE AMBARRUKMO Oleh Departemen Sales Marketing Dalam Membangun Citra Positif Pada Masa Pandemi Covid-19 (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Suara, M. (2024). Proses Pilkada Serentak Gelombang II Tahun 2024 di Banjarnegara menemui babak baru. *Suara Merdeka*.
- Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd. ALFABETA, Cv.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Suprawoto. (2018). Government Public Relations: Perkembangan dan Praktik di Indonesia. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Timothy, C. W. (2017). Social Media and Crisis Communication (L. L. A. Yan Jin (ed.); 1st ed.). Routledge.
- Uje Hartono. (2024, 29 April). Pelantikan 57 Kades Terpilih di Banjarnegara Ditunda 2 Tahun, Ini Sebabnya. Diakses pada 15 Juni 2024 dari <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7316453/pelantikan-57-kades-terpilih-di-banjarnegara-ditunda-2-tahun-ini-sebabnya#>
- Uje Hartono. (2024, 30 April). Demo Tuntut Kades Tetap Dilantik di Banjarnegara Ricuh, 12 Terluka-2 Diamankan. Diakses pada 15 Juni 2024 dari <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7318666/demo-tuntut-kades-tetap-dilantik-di-banjarnegara-ricuh-12-terluka-2-diamankan>
- Uje, H. (2024). Demo Tuntut Kades Tetap Dilantik di Banjarnegara Ricuh, 12 Terluka-2 Diamankan. *Detik Jateng*.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Indonesia). Diakses tanggal 15 Juni 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>

- Utami, F. S. (2022). Strategi Manajemen Krisis Klinik Narini Medical Aesthetic Di Era Pandemi Covid-19. Universitas Nasional.
- Vebrianti, S., & Hidayat, D. (2020). Manajemen Krisis Study From Home dan Kebijakan di Masa New Normal. Diperoleh dari https://www.researchgate.net/publication/350694357_MANAJEMEN_KRISIS_STUDY_FROM_HOME_DAN_KEBIJAKAN_DI_MASA_NEW_NORMAL.
- Wasesa, S. A. (2022). Strategi Public Relations, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Wijana, I Nyoman, Listiawati, Ni Putu, Ekaningtyas, Drahati, Ni Luh.
- Wea, E. R. (2022). Komunikasi Krisis Dinas Pariwisata DIY (Studi Kasus Terkait Manajemen Komunikasi Krisis Dinas Pariwisata DIY Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru) (Doctoral dissertation, UPN "Veteran" Yogyakarta).
- Website Humas, K. B. (2025). Letak Geografis Kabupaten Banjarnegara. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. <https://banjarnegarakab.go.id/pemerintahan/letak-geografis/>
- Widyastuti, A., & Ekoputro, W. (2023). Strategi Komunikasi Krisis Humas Pemkab Nganjuk Dalam Pemulihan Citra Pasca Kasus Korupsi. Sintesa, 2(02), 124-139.
- Widyastuti, T. U., Astuti, P., Adawiyah, R., Oktaoufy, F., & Haikal, M. F. (2024). Ditengah Krisis : Manajemen Komunikasi Public Relation Menangani Situasi Darurat. 3(04), 503-510.
- Wijayanto, W., Martini, R., & Elsitra, G. N. (2022). Kajian Kritis Komunikasi Krisis: Belajar dari Kerumitan Komunikasi Pemerintah Menghadapi Pandemi Covid-19. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 13(1), 149-166. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.149-166>
- Yanuar, D., Muharman, N., Rahmawati, R., Sartika, M., & Oktayuana, Y. A. (2022). Manajemen Krisis Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh Saat Pandemi COVID-19. Jurnal Komunikasi Global, 11(1), 139-163. <https://doi.org/10.24815/jkg.v11i1.25321>